

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang dimaknai sebagai keterlibatan seseorang untuk menumbuhkan rasa memiliki serta berperan aktif dalam kegiatan suatu organisasi (Ningrum dan Mustika, 2020). Dalam kamus bahasa sosiologi yang dikemukakan oleh Theodorson (1969) dalam Mardikanto dan Soebianto (2019), partisipasi merupakan bentuk peran serta individu dalam kelompok tertentu guna berperan dalam kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan profesi atau pekerjaan utamanya. Sedangkan menurut Verhangen (1979) dalam Mardikanto dan Soebianto (2019), partisipasi dapat dipahami sebagai suatu wujud interaksi dan komunikasi tertentu yang menekankan pada distribusi kewenangan, tanggung jawab, serta hasil yang diperoleh. Adisasmita (2018), mengemukakan bahwa partisipasi merupakan suatu peran serta dalam kegiatan perencanaan dan implementasi dari program ataupun proyek pembangunan, dapat pula dikatakan sebagai aktualisasi dari kesediaan secara sukarela untuk berkontribusi secara nyata terhadap implementasi suatu program pembangunan. Dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah harus dilandasi dengan adanya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, partisipasi dapat diartikan dengan makna sebagai ikut andil atau adanya peran secara aktif dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Suwantoro (2020), mengatakan partisipasi masyarakat terdiri atas partisipasi secara aktif serta partisipasi secara pasif. Partisipasi secara aktif dijalankan tanpa perantara, yaitu secara individu ataupun secara kolektif dengan kesadaran untuk membantu program pemerintah melalui inisiatif dan kreativitas, serta berperan pada suatu kegiatan pengembangan agrowisata. Sementara itu, partisipasi secara pasif adalah munculnya pemahaman masyarakat agar tidak melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat hanya menjalankan perintah dan mendukung pelestarian sumber daya alam. Menurut Salmah *et al.*, (2021), menyatakan bahwa partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa berbasis agrowisata merupakan tindakan partisipasi

dalam hal mengelola sumber daya. Ningrum *dan* Mustika (2020), menyatakan bahwa partisipasi diungkapkan sebagai bentuk hak warga masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam proses menentukan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelestarian.

Menurut Mardikanto *dan* Soebianto, 2019; Sriati *et al.*, 2020, menjelaskan terkait partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dan sukarela seseorang, dengan latar belakang alasan intrinsik maupun ekstrinsik, dalam seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung. Partisipasi masyarakat pada pengembangan dan pembangunan terdiri dari empat bentuk tahapan kegiatan yakni:

1) Partisipasi dalam bentuk Perencanaan

Partisipasi petani dalam perencanaan dapat terwujud melalui peran serta masyarakat pada kegiatan berupa rapat-rapat yang diselenggarakan. Tahap perencanaan ini berkaitan dengan sejauh mana masyarakat sadar akan masalah yang dihadapi dalam situasi dan kondisi mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini sangat penting untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain dan untuk menghindari pemaksaan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Partisipasi petani dalam tahap perencanaan dinilai dengan terlibatnya petani dalam proses musyawarah dengan memberikan usulan ide atau pendapat untuk rencana kegiatan kedepannya dan petani merasa mendapatkan informasi yang cukup untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

2) Partisipasi dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan ini merupakan tahapan paling krusial pada kegiatan pembangunan dikarenakan hal mendasar dalam pembangunan merupakan tahapan saat pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam aneka macam jenis partisipasi aktif yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada tahapan ini yaitu partisipasi berupa tenaga, bahan, dana serta beberapa bentuk partisipasi yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Partisipasi petani dalam tahap pelaksanaan dinilai dengan terlibatnya petani dalam kegiatan yang dilaksanakan serta petani mengikuti rangkaian kegiatan sehingga petani tersebut secara aktif terlibat dalam tahap pelaksanaan.

3) Partisipasi dalam bentuk Evaluasi Kegiatan

Tahapan evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan dikarenakan partisipasi masyarakat menyampaikan *feedback* yang berguna demi penyempurnaan program pada masa mendatang. Evaluasi ini meliputi kemampuan masyarakat untuk menilai suatu program tersebut baik atau buruk, berhasil atau tidak, serta efektif atau tidak. Dengan adanya proses evaluasi ini, masyarakat dapat lebih sadar dan mandiri untuk memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan tersebut. Partisipasi petani dalam tahap evaluasi dinilai dengan adanya umpan balik berupa usulan maupun saran yang disampaikan oleh petani terkait kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dengan adanya proses pemantauan melalui evaluasi kegiatan ini petani akan lebih siap untuk kegiatan kedepannya dari hasil yang diperoleh.

4) Partisipasi dalam bentuk Pemanfaatan Hasil

Tujuan dari pengembangan agrowisata yaitu sebagai peningkatan kualitas hidup petani dan diperoleh hasil dari pengembangan tersebut untuk dapat mendorong partisipasi sukarela para petani. Partisipasi petani sangat penting untuk merasakan manfaat dari hasil yang telah diraih melalui pembangunan. Hal ini mencakup upaya pemerataan dalam hal kesejahteraan dan layanan fasilitas, pemerataan peluang usaha dan pendapatan, serta partisipasi dalam merasakan serta memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi petani pada tahap pemanfaatan hasil dinilai dengan adanya *benefit* yang diperoleh petani baik berupa uang maupun barang dari terlibatnya kegiatan tersebut, serta petani merasa puas dari hasil yang diperoleh dengan adanya kesempatan untuk memasarkan hasil produksi secara langsung maupun melalui kegiatan diversifikasi produk.

Dusseldorp (1981), menyatakan bahwa ada beberapa macam ragam atau bentuk kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi yang melibatkan masyarakat, seperti:

- 1) Terlibat dengan menjadi anggota dari kelompok-kelompok kemasyarakatan
- 2) Ikut dalam kegiatan diskusi kelompok
- 3) Terlibat pada kegiatan organisasi dengan tujuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat yang lainnya

- 4) Terlibat dalam mendorong sumberdaya
- 5) Ikut dalam mengambil bagian untuk memberikan suara atau pendapat terkait pengambilan keputusan.

2.1.2 Pengembangan Desa

Tata ruang desa terdiri dari tiga elemen penting yaitu rehabilitasi yang bertujuan memperbaiki infrastruktur yang ada, rekonstruksi yang berkaitan dengan pembangunan kembali area yang mengalami kerusakan, serta pengembangan desa yang berfokus pada peningkatan fasilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat (Ningrum dan Mustika, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan dimaknai sebagai cara ataupun proses secara bertahap untuk tujuan yang ingin dicapai. Suwanto (2020), menyatakan bahwa pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan suatu produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang serta bertahap.

Jika ditelusuri kembali perjalanan sejarah peradaban manusia, maka akan ditemukan berbagai upaya yang dilalui manusia guna membenahi sekaligus mengoptimalkan kualitas hidupnya demi kelangsungan hidup dan tercapainya kesejahteraan bagi manusia (Setiadi *et al.*, 2006). Rinanti (2017), menyatakan bahwa pembangunan ditujukan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, atau secara sederhana bertujuan memperbaiki mutu kehidupan rakyat secara umum. Pembangunan dan pengembangan suatu desa diatur dengan tujuan untuk mendapatkan arahan agar tercapainya tujuan keberlanjutan suatu desa (Handayani, 2020).

Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan suatu desa ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan didukung dengan kualitas hidup manusia yang baik. Handayani (2020), mengatakan bahwa peningkatan kualitas hidup yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat didasari oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, pengembangan potensi berbasis lokal, adanya pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bihamding (2017), mengemukakan bahwa pembangunan dapat melibatkan berbagai proses yang dilakukan oleh individu atau secara perorangan, serta juga

dapat berupa kegiatan yang dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan produktif, serta diberdayakan dalam partisipasi dan kontribusi mereka dalam merumuskan program pembangunan yang diperlukan. Hal ini mencakup memberikan ide-ide yang konstruktif, dengan sukarela menyerahkan sebagian lahan mereka, serta bersedia mengumpulkan dana untuk melaksanakan pembangunan di desa mereka (Adisasmita, 2018).

Yusrina dan Widodo (2022), mengatakan bahwa dalam pengembangan suatu desa dapat diwujudkan dengan mengembangkan sumber daya yang terdapat pada desa tersebut misalnya feson alam, budaya, ekowisata, pedesaan serta agrowisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Handayani (2020), bahwa potensi desa terdiri dari adanya keindahan alam, terdapat sarana edukasi, adanya sosial budaya, hasil bumi atau alam yang memadai serta terdapat flora maupun fauna yang khas. Sedangkan menurut Guntoro (2022), mengatakan bahwa dalam pengembangan agrowisata harus memiliki pesona atau daya tarik pada agrowisata yang meliputi pesona lingkungan, pesona spesies, pesona historis, pesona teknologi, pesona produk. Dengan adanya pengembangan potensi yang dimiliki desa tersebut, ini akan menjadi salah satu alternatif munculnya lokasi wisata yang memiliki berbagai macam karakteristik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

2.1.3 Agrowisata

Agrowisata (*agrotourism*) dapat diartikan suatu ragam kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan sektor agro (agribisnis) sebagai objek wisatanya. Kegiatan ini bertujuan demi meningkatkan wawasan, memberikan pembelajaran secara langsung, menawarkan sarana rekreasi, serta memperkuat koneksi bisnis di sektor pertanian. Dengan demikian, agrowisata yakni jenis pariwisata yang menjadikan hasil dari pertanian, peternakan, dan perkebunan sebagai fokus daya tarik bagi pengunjung (Ramadani dan Mayarni, 2021).

Budiasa dan Ambarawati (2014) dalam Ilvira dan Arumugam (2024), mengatakan bahwa dalam pengembangan agrowisata terdiri dari dua konsep. Pertama merupakan agrowisata yang berbasis modal (*capital-based agrotourism*), dimana pada konsep pengembangan agrowisata ini lebih ditekankan pada sejauh mana kemampuan modal seorang investor dalam mengidentifikasi kesempatan

memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan agrowisata, dengan tujuan dapat meraih hasil yang optimal. Kedua merupakan agrowisata yang berbasis masyarakat (*community-based agrotourism*), dimana pada konsep pengembangan agrowisata ini dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan agrowisata. Pengembangan desa yang melibatkan partisipasi dari masyarakat merupakan model pembangunan yang dapat memberikan sebuah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa berbasis agrowisata.

Dalam melakukan perencanaan pengembangan desa berbasis agrowisata, perlu diperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan menurut Handayani (2020) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terjangkaunya aksesibilitas yang baik
- 2) Objek wisata yang menjadi daya tarik dan dikenal dikalangan masyarakat
- 3) Dukungan *stakeholder* dalam mendukung agrowisata
- 4) Terjaminnya kondisi keamanan di wilayah desa
- 5) Fasilitas akomodasi tersedia, jaringan telekomunikasi serta ketersediaan tenaga kerja yang cukup

Dengan kata lain bahwa dalam perencanaan pengembangan desa yang berbasis agrowisata harus didukung dengan kenyamanan wisatawan dalam berkunjung untuk menikmati objek wisata yang memiliki daya tarik didukung adanya fasilitas yang memadai dengan tetap memprioritaskan prinsip pengembangan secara ramah lingkungan (Handayani, 2020).

Unga *et al.*, (2022), mengatakan bahwa pengembangan desa berbasis agrowisata dapat dilakukan dengan cara *grow and build* (tumbuh dan bina), yang dapat diartikan bahwa pengembangan desa yang berbasis agrowisata dapat disesuaikan dengan minat wisatawan agar lebih tertarik untuk berkunjung, memberikan edukasi bagi kelompok tani ataupun kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk memasarkan atau mempromosikan hasil olahan dari agrowisata tersebut, dan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara memberikan pendampingan, dan pelatihan bagi petani dan juga kelompok sadar wisata.

Handayani (2020), menyatakan bahwa pembangunan berbasis wilayah pedesaan harus menekankan pentingnya kearifan lokal dengan mempertimbangkan

berbagai aspek kawasan pedesaan, hal ini meliputi komposisi demografis penduduk, aspek sosial dan budaya, kondisi fisik dan geografis, pola usaha pertanian, keterkaitan perekonomian antara pedesaan dengan perkotaan, kelembagaan desa serta karakteristik wilayah permukiman. Tingkat kepentingan pembangunan desa yang memusatkan perhatian pada strategi pengembangan berbasis pedesaan (*rural based development*) terdiri dari:

- 1) Pemberdayaan ekonomi lokal; dengan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus mengoptimalkan produktivitas pertanian.
- 2) Akses pendidikan dan pelatihan; dengan meningkatkan akses pendidikan dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan bagi masyarakat.
- 3) Penguatan infrastruktur; meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik.
- 4) Penguatan kelembagaan; dengan membangun kapasitas lembaga lokal untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa berbasis agrowisata.

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan agrowisata adalah langkah untuk memulihkan ekonomi. Membangun agrowisata yang menonjolkan budaya lokal, meningkatkan pendapatan petani, dan juga memanfaatkan lahan secara optimal, dapat menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusrina dan Widodo, 2022).

2.1.4 Faktor-faktor yang memengaruhi Partisipasi Petani Dalam Pengembangan Desa Berbasis Agrowisata

1. Motivasi

Motivasi adalah sebuah dorongan dalam tindakan yang berasal dari keinginan diri sendiri maupun pengaruh faktor dari luar dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan (Rosada *et al.*, 2022). Motivasi bagi petani dalam melakukan suatu kegiatan merupakan hal yang sangat penting, dorongan yang diberikan akan membentuk sikap bagi petani. Pentingnya motivasi bagi petani dalam hal berbudidaya akan mendapatkan peningkatan pendapatan (Rosyid, 2021). Sejalan dengan pendapat Mardikanto (2010) dalam Widyasari *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi sangat ditentukan oleh motivasi yang

melatarbelakanginya, seperti kebutuhan, dorongan, tuntutan, keinginan serta ekspektasi yang ingin diwujudkan.

Hartini (2021), menurut bukunya dengan judul “Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)” menjelaskan bahwa terdapat teori Motivasi oleh Herzberg (1993) yang menyatakan bahwa motivasi seseorang mendapat pengaruh dari dua faktor, yaitu faktor motivator yang timbul dari dorongan diri individu atau bersifat intrinsik, dan faktor *hygiene* yang muncul karena dorongan dari luar atau bersifat ekstrinsik.

Keterlibatan seorang petani dalam pengembangan desa berbasis agrowisata harus dilandasi oleh motif atau keinginan dalam mencapai sebuah tujuan. Baik itu tujuan individu maupun kelompok yang ada di kelompok tani Kecamatan Perbaungan. Dengan adanya motivasi yang tinggi oleh para petani, yaitu dengan keinginan dari diri petani langsung untuk memperoleh pengalaman baru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang memberikan pengetahuan bagi petani sehingga petani akan terampil dalam kegiatan pengembangan agrowisata ini dan juga keinginan dari faktor lainnya seperti ingin terlibat dan berkolaborasi dengan *stakeholder* dan keinginan untuk memperoleh pendapatan bagi petani, ini akan memengaruhi keterlibatan seorang petani dalam pengembangan desa berbasis agrowisata.

2. Peran Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, bahwa hal ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha supaya mau serta mampu untuk mengkondisikan dirinya untuk mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, serta sumberdaya lainnya sebagai suatu upaya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan serta kesejahteraan, dan juga berkaitan dengan untuk meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyuluh memiliki peran untuk memfasilitasi proses pembelajaran kepada pelaku utama dan pelaku usaha, adanya upaya menyediakan untuk kemudahan akses terhadap sumber informasi, teknologi dan sumber daya lain untuk pengembangan usahatani, peningkatan kapasitas

kepemimpinan, manajemen dan kewirausahaan, mendukung pembentukan dan pengelolaan kelompok tani, membantu pemecahan berbagai permasalahan serta respon terhadap peluang dan tantangan, menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta membangun dan memperkuat lembaga pertanian yang maju dan modern.

Menurut Marbun *et al.*, (2019), penyuluh pertanian dapat dipahami sebagai suatu inisiatif dengan tujuan untuk mengubah perilaku para petani beserta keluarga petani, upaya ini diarahkan supaya petani tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga dapat mengembangkan motivasi serta kemampuan secara mandiri dalam hal mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berusahatani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup petani. Berkenaan dengan hal tersebut, peran penyuluh dapat dipahami sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan inovator. Abdullah *et al.*, (2021), menjelaskan peran penyuluh pertanian tersebut yaitu:

- a) Fasilitator; peran penyuluh sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan dukungan terhadap kebutuhan dan keperluan petani binaan dalam seluruh rangkaian kegiatan, penyuluh memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani merupakan salah satu fungsinya sebagai fasilitator.
- b) Komunikator; peran penyuluh sebagai komunikator yaitu dengan memberikan informasi dan menyampaikan pesan kepada petani binaannya
- c) Motivator; peran penyuluh sebagai motivator yaitu dengan menumbuhkan semangat kerja pada petani dan memberikan dorongan motivasi agar tergerak untuk mengikuti kegiatan yang telah direncanakan.
- d) Inovator; peran penyuluh sebagai inovator yaitu dengan memberikan gagasan baru dalam pemanfaatan sarana yang tersedia agar dapat mendorong peningkatan pendapatan bagi para petani.

3. Dukungan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas perekonomian untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Masruroh *et al.*, 2021). Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi yang menjadi fondasi kehidupan adalah tanggung jawab pemerintah. Secara garis besar, peran pemerintah adalah

tindakan dari lembaga pemerintahan untuk melayani masyarakat demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga, termasuk dalam pengembangan desa. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama di bidang ekonomi dan industri yang memegang peranan penting dalam memperkuat pertumbuhan dan pengembangan desa (Fakhrurozi, 2023). Dengan kebijakan dan program yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan daya saing, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Menurut Ramdayanti *et al.*, (2021), menyatakan bahwa terdapat beberapa dukungan pemerintah melalui adanya pemberdayaan masyarakat yang dapat meliputi pengembangan desa berbasis agrowisata, dukungan pemerintah tersebut yakni sebagai:

- a) Fasilitator; membangun situasi yang kondusif untuk mendukung pembangunan melalui koordinasi kepentingan yang beragam untuk optimalisasi pengembangan wilayah. Pada kapasitas ini, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pembangunan, termasuk pendampingan serta dukungan pendanaan atau permodalan. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
- b) Regulator; peran yang diberikan oleh pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Dengan adanya regulasi yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa semua pihak mengikuti ketentuan yang ada, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan terarah. Peran ini memegang peranan penting dalam menjaga keteraturan serta menegakkan keadilan pada pelaksanaan program-program pembangunan.
- c) Dinamisator; peran yang diberikan oleh pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat ketika menghadapi kendala dalam proses pembangunan, dengan tujuan untuk mendorong dan mempertahankan dinamika pembangunan daerah. Dalam perannya ini, pemerintah memberikan pembinaan yang intensif serta efektif kepada para masyarakat. Pemerintah tidak sekedar

berperan sebagai penggerak, selain itu juga berperan sebagai penggerak keberlanjutan dan efektivitas pembangunan di tingkat masyarakat.

- d) Katalisator; berperan dengan tujuan sebagai penggerak utama yang mendorong percepatan pengembangan sumber daya lokal dan nasional. Pemerintah dapat menciptakan modal sosial yang penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Peran ini sangat krusial dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih baik. Selain fokus pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan struktur sosial yang baik di berbagai aspek kehidupan.

4. Sarana dan Prasarana

Handayani (2020), menyatakan bahwa sarana mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan desa dan mendukung pemberdayaan masyarakat setempat, sedangkan prasarana merujuk pada infrastruktur yang mencakup semua elemen penting yang berperan besar dalam mengarahkan dan memengaruhi perkembangan masa depan suatu desa.

Ketersediaan sarana dan prasarana diyakini memengaruhi partisipasi petani dalam mengikuti suatu kegiatan (Sandi *et al.*, 2022). Sarana dan prasarana yang mudah di akses bagi petani tentunya akan memudahkan petani dalam menjalankan program yang ingin dilaksanakan (Mufidah *et al.*, 2021). Menurut Handayani (2020), bahwa dalam proses pengembangan berbasis pedesaan harus melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik, selain itu ketersediaan akomodasi dan jaringan telekomunikasi juga akan mendukung kegiatan pengembangan berbasis pedesaan. Pengkajian yang telah dilakukan Achdiyat dan Annisa (2022), menyatakan bahwa partisipasi petani dapat dipengaruhi dengan adanya sarana prasarana serta sistem informasi yang mendukung. Sejalan dengan pernyataan tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas seperti adanya aksesibilitas yaitu akses jalan dengan kondisi yang baik, infrastruktur yang mendukung seperti halnya fasilitas agrowisata yang tersedia dan juga sistem promosi dan informasi yang terus memberikan informasi mengenai agrowisata dan mempromosikan agar agrowisata tersebut dapat dikenal

oleh masyarakat luas, hal tersebut merupakan suatu langkah penting dalam upaya untuk mengembangkan desa berbasis agrowisata.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah penting dalam terlibatnya petani untuk pengembangan desa. Keterlibatan petani tersebut akan memastikan bahwa fasilitas yang tersedia akan memudahkan dalam kegiatan pengembangan desa berbasis agrowisata sesuai dengan kebutuhan petani itu sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil identifikasi penelitian terdahulu terkait partisipasi petani dalam pengembangan desa berbasis agrowisata dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Lukman Effendy, Ruwan Diantoro (2020)	Partisipasi Petani Dalam Penerapan Pemupukan Berimbang Padi Sawah Di Kecamatan Sindangwangi Majalengka	Variabel X: 1. Faktor Internal a. Umur b. Pendidikan c. Pengalaman berusahatani d. Luas lahan e. Kepemilikan Lahan 2. Faktor Eksternal a. Ketersediaan sarana produksi b. Intensitas penyuluhan c. Ketersediaan informasi Variabel Y: Partisipasi	Partisipasi petani dalam penerapan pemupukan berimbang padi sawah masih dalam kategori rendah. Faktor yang berhubungan terhadap partisipasi petani yaitu pengaruh internal (pendidikan, pengalaman berusahatani) dan pengaruh eksternal (ketersediaan sarana produksi, dan intensitas penyuluhan).
2.	Riska Putri Wahyuni, Rahmad Pulung Sudibyo, Nur Ocvanny Amir (2021)	Faktor-Faktor yang Berperan Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Dalam Budidaya Tanaman Organik Di Kecamatan Junrejo Kota Batu	Variabel X: a. Pengetahuan petani b. Pekerjaan dan pendapatan petani c. Sarana dan prasarana d. Pihak yang mendukung e. Inovasi Variabel Y: Tingkat Partisipasi	Tingkat partisipasi petani berada dalam kategori sedang. Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi petani yakni pengetahuan petani, sarana dan prasarana, dan adanya pihak yang mendukung.

Lanjutan Tabel 1.

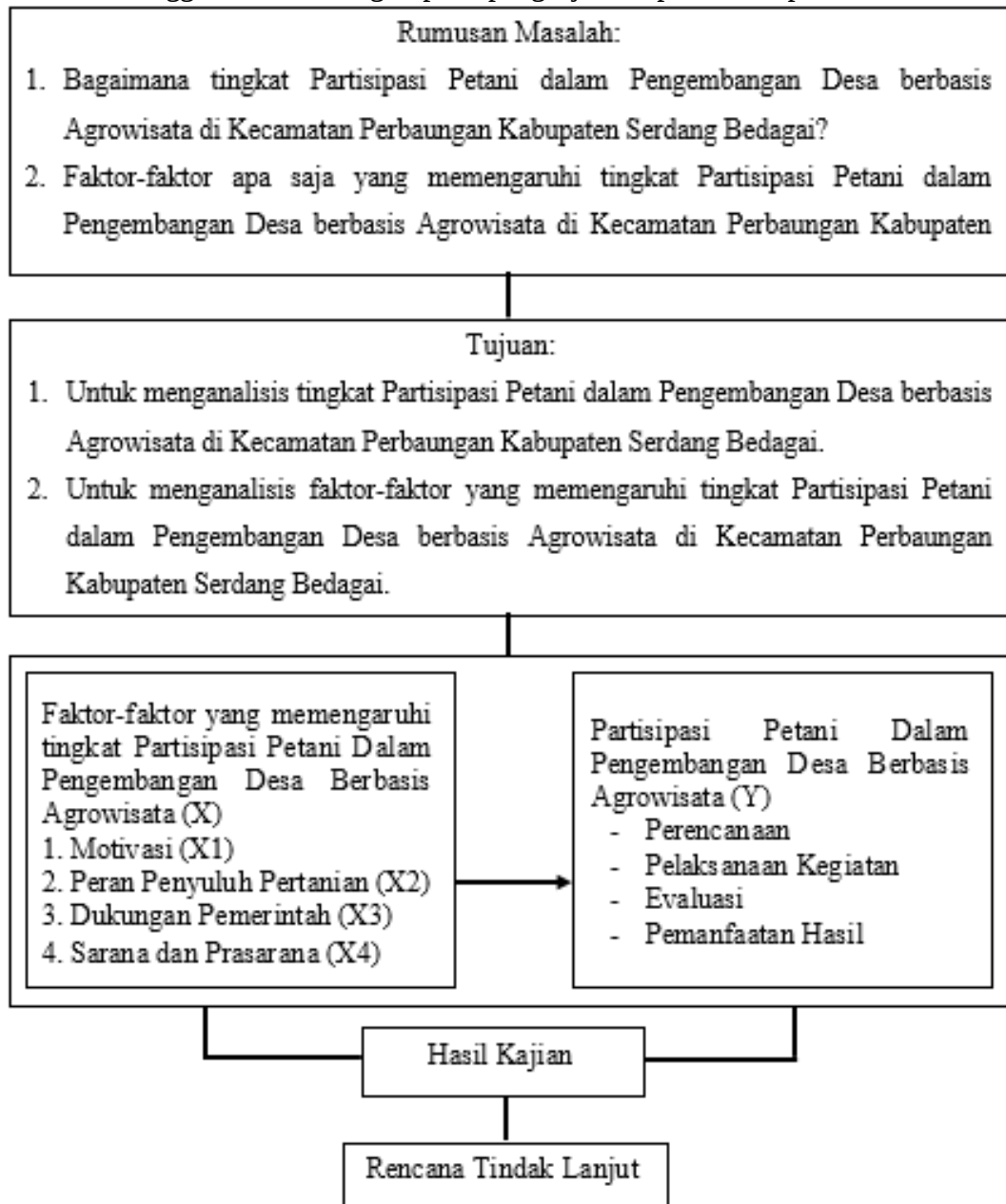
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
3.	Ida Rosada, Farizah Dhaifina Amran, Nurul Azizah (2022)	Persepsi dan Motivasi Petani Terhadap Kearifan Lokal Dalam Berusaha Tani Padi (Studi Kasus Kearifan Lokal Mappalili di Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)	Variabel X: a. Persepsi b. Motivasi - Internal - Eksternal Variabel Y: Persepsi dan Motivasi Terhadap Kearifan Lokal dalam Berusaha Tani	Hasil pengkajian diperoleh bahwa persepsi petani dan motivasi petani terhadap Tradisi Mappalili sangat baik.
4.	Desy Natasha V.D. Marbun, Sriroso Satmoko, Siwi Gayatri (2019)	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli	Peran Penyuluh: a. Motivator b. Komunikator c. Fasilitator d. Inovator	Hasil pengkajian menunjukkan bahwa peran penyuluh memiliki pengaruh secara nyata terhadap pengembangan kelompok tani di Kecamatan Siborongborong.
5.	Angela Apriliany Abdullah, Dwi Rahmawati, Muhammad Abrar Panigoro, Rafiq Ramdan Syukur, Jihan Khali (2021)	Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo	Variabel X Peran Penyuluh: a. Motivator b. Inovator c. Fasilitator d. Komunikator Variabel Y: Partisipasi Petani	Peran penyuluh pertanian dilihat dari sebagai motivator, inovator, fasilitator dan komunikator sudah cukup berperan dalam proses meningkatkan partisipasi petani
6.	Elvira Ramdayanti , Gilli Argenti, Prilla Marsingga (2021)	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang	Peran Pemerintah: a. Fasilitator b. Regulator c. Dinamisator d. Katalisator	Peran pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi para nelayan. Dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Karawang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.

Lanjutan Tabel 1.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
7.	Muhammad Viki Nisfani Al Azis (2022)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi	Peran Pemerintah Desa a. Regulator b. Dinamisator c. Fasilitator d. Katalisator	Peran pemerintah desa sebagai regulator dikatakan baik karena sudah mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan peran pemerintah desa sebagai dinamisator dan katalisator dikatakan kurang baik dan peran sebagai fasilitator dapat dikatakan cukup baik.
8.	Achdiyat, Siti Fatimah Annisa (2022)	Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pemanfaatan Limbah Jerami Padi Sebagai Pupuk Kompos	Variabel X: a. Usia b. Tingkat pendidikan c. Lama berusaha tani d. Luas lahan e. Peran penyuluh f. Ketersediaan sarana prasarana g. Ketersediaan informasi	Tingkat partisipasi petani tergolong tinggi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni luas lahan, peran penyuluh, ketersediaan sarana prasarana, serta ketersediaan informasi yang mendukung dalam pemanfaatan limbah jerami padi sebagai pupuk kompos.
9.	Padillah Sandi, Miftakhul Arifin, Endah Puspitojati (2022)	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Anggota Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Di KWT Wanita Mandiri Di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Kepulauan <u>Bangka Belitung</u>	Variabel Y: Tingkat Partisipasi Variabel X: a. Motivasi b. Pendidikan c. Sarana dan Prasarana d. Dukungan Keluarga Variabel Y: Partisipasi	Partisipasi anggota KWT dalam pelaksanaan kegiatan P2L berada di kategori sedang. Terdapat pengaruh antara sarana dan prasarana dan dukungan keluarga terhadap partisipasi anggota KWT.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pengkajian secara sistematis. Kerangka pikir memudahkan peneliti maupun pembaca untuk melihat seluruh arah penelitian mulai dari awal hingga akhir. Kerangka pikir pengkajian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengkajian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan melalui tinjauan literatur dan kerangka teoritis yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian secara ilmiah. Hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga tingkat partisipasi petani dalam pengembangan desa berbasis agrowisata di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang.
2. Diduga faktor-faktor motivasi, peran penyuluh pertanian, dukungan pemerintah, dan sarana dan prasarana memengaruhi tingkat partisipasi petani dalam pengembangan desa berbasis agrowisata di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.